

PENGAWASAN MASYARAKAT ADAT PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DISTRIK TIOM KABUPATEN LANNY JAYA.

WERNICE TABUNI
MASJE.S.PANGKEY
JOORIE M.RURU

Abstract: tiom District as one of the districts Lanny Jaya Regency, in the implementation of development remains experiencing barriers due to constraints in planning exercises. Besides, coordination between the various government officials not run properly, how to work the expected effect control these things lead. the achievement of development goals do not always go as expected. Therefore, to meet the maximum goal achievement, government management functions include planning, coordinating and monitoring the implementation of development must get the attention it heartily. So the main characteristic is the human resource development activities aimed at behavior change. This study aimed to analyze the leadership of the District in the implementation of human resource development in the District Tiom Lanny Jaya Regency. The research method is qualitative. Primary data is depth interviews with 11 informants. The secondary data is literature, articles, journals, as well as the internet sites that are pleasing to the research conducted. Informant selection technique consists of, the district secretaries, three section heads, three subsections two staff members, one village head, one headman. Methods of data collection observation (observation), the state of the environment outside the district or districts, interviews researchers dig as much data related to the subject matter. Data analysis technique. The data collected and predict data from various sources, ie in-depth interviews, direct observation, which was written by the remarks field. Data was analyzed as a whole and make marginal notes about the data that is deemed necessary and in accordance also with the objectives and purposes of research. Motivation is an inner drive that generate power or energy that humans behave mobilizing to achieve the goal, the proper motivation can achieve the objectives of individuals and bureaucratic objectives.

*Keywords: The Head of tde Dstrict LeadershipStile on Implementation of Human Resources
Deploiment in the District Tiom Lanny Jaya Regency papua Province.*

PENDAHULUAN

Salah satu ciri yang paling menonjol dalam kehidupan masyarakat Indonesia, ialah keterikatan dan orientasi pada pembangunan nasional. Indonesia sebagai suatu negara yang mayoritas penduduknya bermukim atau hidup di Daerah pedesaan, dan mereka ini umumnya hidup sebagai petani yang umumnya miskin baik dalam ekonomi maupun sosial (Taliziduhu, 1987:17). Akan tetapi bagaimanapun keadaan kehidupan masyarakat adat dan apapun yang terjadi dengan mereka, masyarakat Pedesaan merupakan bagian dari masyarakat bangsa Indonesia yang turut menentukan, baik sebagai penentu sejarah maupun penentu ciri-ciri masyarakat Indonesia masa kini maupun dimasa-masa yang akan datang.

Sebagai bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, masalah-masalah pembangunan dinegara ini adalah juga

terutama merupakan masalah-masalah pedesaan; dan masalah-masalah masyarakat Indonesia tentunya juga sebagian besar adalah bersifat masalah-masalah masyarakat pedesaan. Dan menyadari hal demikian ini maka pembangunan pedesaan dijadikan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional bangsa Indonesia. Akan tetapi kenyataan hingga saat ini pembangunan pedesaan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan perkotaan, sehingga terlihat adanya ketimpangan yang mencolok antara kota dan , baik dilihat dari keadaan kemajuan fisik maupun tingkat kemajuan kehidupan masyarakatnya.

Ciri utama dari pembangunan ialah menjadikan masyarakat atau rakyat sebagai sasaran, sekaligus sebagai alat dari proses pembangunan. Dengan kata lain, masyarakat/rakyat dijadikan sebagai obyek dan sekaligus sebagai subyek pembangunan,

sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai pemberi pengarahan, pengendalian/pengawasan, dan penggairahan melalui pemberian fasilitas-fasilitas yang diperlukan.

Dari uraian diatas jelas bahwa pengawasan serta atau partisipasi masyarakat merupakan kunci utama terselenggaranya pembangunan. Dengan kata lain, masyarakat yang diharapkan dapat mengelola (memanage) pembangunan, baik dalam hal merencanakannya, melaksanakannya, maupun mengendalikan atau mengawasinya; sedangkan pemerintah berperan hanya sebagai pemberi bimbingan, dan bantuan fasilitas yang diperlukan. Hal-hal yang diuraikan diatas dari hasil pengamatan sementara (prasurevei) juga masih nampak dan menjadi permasalahan pembangunan di Wilayah Distrik Tiom dimana penelitian ini akan dilakukan. Ada indikasi bahwa pengawasan masyarakat adat pada pelaksanaan pembangunan di Wilayah tersebut belum efektif. Karena adanya baik dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan, dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan latar belakang oleh permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai Pengawasan Masyarakat Adat pada Pelaksanaan Pembangunan di Distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya. Oleh karena itu, masalah yang ditemukan pada saat penulis melakukan penelitian sehingga rasa menelitinya. Dengan penelitian ini Berjudul **”Pengawasan Masyarakat Adat Pada Pelaksanaan Pembangunan di Distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya.**

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pengawasan

Sebagai fungsi manajemen, pengawasan mengandung pengertian sebagai usaha mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan

korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana (Terry, 1986:34); atau sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Siagian, 1981:45). Singkatnya, pengawasan merupakan proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap suatu kondisi yang dihasilkan oleh sarana sebagai sasaran (Nawawi, 1989).

George R. Terry (1986) mengemukakan bahwa pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa pengawasan terdiri dari suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah-langkah yang bersifat universal, yaitu (1) mengukur hasil pekerjaan, (2) membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dari memastikan perbedaan apabila ada perbedaan, dan (3) mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan. Dengan kata lain Terry mengemukakan bahwa pengawasan terdiri dari tindakan-tindakan : (a) mencari keterangan tentang apa yang sedang dilaksanakan; (b) membandingkan hasil-hasil dengan harapan-harapan yang menyebabkan timbulnya tindakan dan (3) penyetujuan hasil-hasil atau menolak hasil-hasil dalam kasus mana perlu ditambahkan penambahan tindakan - tindakan perbaikan.

Bintoro Tjokroamodjojo (1984) dengan berdasarkan pada hakekat pengertian pengawasan yang ada mengemukakan bahwa tujuan dari pada pengawasan adalah:

- (1) mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencananya;
- (2) apabila terdapat penyimpangan maka dapat diketahui seberapa jauh

penyimpangan tersebut dan apa sebabnya; dan

- (3) dilakukannya tindakan koreksi terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat dilihat bahwa sebagai salah satu bagian dari proses manajemen, pengawasan bukanlah suatu tindakan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan merupakan aktivitas manajemen yang dimaksudkan untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan dan kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan-tindakan korektif.

Pengertian Adat Isti Adat

Yang dimaksud dengan adat istiadat adalah aneka kelaziman dalam suatu negeri yang mengikuti pasang naik dan pasang turun situasi masyarakat. Kelaziman ini pada umumnya menyangkut penanggungjawaban untuk rasa seni budaya masyarakat, seperti acara-acara keramaian anak negeri, seperti pertunjukan tari – tarian dan aneka kesenian yang dihubungkan dengan upacara peralatan perkawinan, pengangkatan penghulu maupun untuk menghormati kedatangan tamu agung. Adat istiadat semacam ini sangat tergantung pada situasi sosial ekonomi masyarakat. Bila sedang panen biasanya meriah, begitu pula bila keadaan sebaliknya. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai – nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan disuatu daerah (Martono, 2011).

Konsep Masyarakat Adat.

Masyarakat berasal dari kata *society* (inggris), *socius*: kawan (latin), *syarka*: ikut serta berpartisipasi (Arab). Secara umum, masyarakat mempunyai ciri:

1. Adanya kumpulan individu

2. Tinggal ditempat dan waktu tertentu
3. Adanya aturan atau adat istiadat yang mengatur untuk pencapaian tujuan bersama

Dalam kurun waktu tertentu kumpulan individu mengalami proses adaptasi dan organisasi dari tingkah laku para anggotanya serta timbul perasaan berkelompok secara lambat laun (*i'esprite de corps*). Terdapat empat norma kemasyarakatan yang berupa perintah atau larangan yang bersifat mengikat dan memaksa, yakni:

a. Cara (usage)

Menunjukkan pada perbuatan individu terhadap individu lain, berkekuatan lemah karena penyimpangan yang terjadi tidak akan mengakibatkan hukuman yang berat, hanya sekedar celaan saja.

b. Kebiasaan (folkways)

Mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar dari *usage*. Pelanggaran yang terjadi dapat mengakibatkan seseorang dianggap menyimpang dari kebiasaan umum masyarakat.

c. Tata kelakuan (mores)

Menurut Mac Iver dan H. Page, *mores* adalah kebiasaan yang ada didalam masyarakat yang diterima sebagai norma pengatur dalam masyarakat tersebut. *Mores* ini merupakan pencerminan dari sifat- sifat yang hidup dalam kelompok manusia sebagai alat pengawasan, pemaksa dan alat untuk melarang sesuatu agar anggota masyarakat itu menyesuaikan perbuatannya dengan tata kelakuan tersenut.

d. Adat kebiasaan (custom)

Custom terjadi dari suatu *mores* yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola kelakuan masyarakat. Pelanggaran yang terjadi akan mendapat sanksi keras, yang terkadang tidak secara langsung diperlakukan.

Comte menjelaskan masyarakat merupakan makhluk hidup dengan realitas – realitas baru yang berkembang menurut

hukum – hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangannya sendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya. Ciri – ciri masyarakat dalam suatu bentuk kehidupan bersama menurut Soekanto (1983) adalah :

1. Manusia yang hidup bersama. Didalam ilmu sosial tidak ada ukuran yang mutlak ataupun agak yang pasti untuk menentukan beberapa jumlah manusia yang ada. Akan tetapi secara teoritis, angka minimumnya adalah dua orang yang hidup bersama.
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda – benda mati seperti kursi, meja, dan sebagainya. Oleh karena perkumpulannya manusia, maka akan timbulnya manusia – manusia baru. Manusia itu juga bercakap-cakap, merasa dan mengerti; mereka juga mempunyai keinginan – keinginan untuk menyampaikan kesan – kesan dan perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan – peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.
3. Mereka sandar bahwa mereka bukan satu kesatuan.
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena itu setiap anggota merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian, berarti masyarakat bukan sekedar kumpulan manusia semata tanpa ikatan, akan tetapi terdapat hubungan fungsional antar satu sama lainnya. Setiap individu mempunyai kesandaran akan keberadaannya di tengah – tengah individu lain. Sistem pergaulan didasarkan atas kebiasaan atau lembaga

kemasyarakatan yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut Mac Iver didalam masyarakat terdapat suatu sistem cara kerja dan prosedur dari pada otoritas dan saling bantu membantu yang meliputi kelompok- kelompok dan pembagian- pembagian sosial lainnya.

A. Konsep Pembangunan

Pengertian dan definisi mengenai pembangunan telah banyak dikemukakan dalam berbagai literatur kepustakaan. Definisi yang diberikan pada kata pembangunan seringkali berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang ilmu masing-masing. Ada pendapat yang mengatakan bahwa era pembangunan adalah ketergantungan antar manusia adalah konsep berpikir pembangunan adalah usaha untuk mengurangi atau meniadakan orang miskin; pembangunan adalah pemenuhan kebutuhan pokok dan bukan pemenuhan keinginan; pembangunan adalah proses penentuan tujuan alokasi dana, dan penggunaan dana tersebut dengan efektif; pembangunan adalah usaha masyarakat untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupannya; pembangunan adalah proses untuk mencapai kehidupan manusia yang adil dan makmur; pembangunan adalah cara untuk mencapai manusia seutuhnya; bahkan pembangunan yang diartikan sebagai wadah untuk melakukan korupsi bagi orang yang tamak dan mementingkan diri sendiri (Development Studies Program, dalam Firman Aji dan Sirait, 1982) .

Definisi lain dikemukakan oleh Michael Todaro (dalam Bryant & White, 1985) bahwa pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang menyangkut reorganisasi dan reorientasi sistem. ekonomi dan sistem, sosial secara keseluruhan; yaitu disamping peningkatan pendapatan dan output, juga menyangkut perubahan radikal struktur kelembagaan, struktur sosial, serta struktur administratif, dan perubahan sikap, adat kebiasaan serta kepercayaan.

Dari pengertian atau definisi tersebut diatas dapat dilihat bahwa pembangunan merupakan suatu konsep yang luas dan bahkan rumit, sehingga memunculkan interoretasi yang berbeda dan bahkan bertentangan satu sama lainnya. Suatu hal yang dapat disimpulkan bahwa inti daripada pembangunan itu pada hakekatnya adalah perubahan, yaitu keinginan untuk merubah apa-apa yang lama atau yang kurang bernilai menuju ke nilai-nilai baru yang dinilai lebih baik secara terencana. Tujuan pembangunan tidak lain adalah untuk perbaikan kondisi kehidupan bangsa atau masyarakat ke arah yang lebih baik; dengan kata lain adalah untuk kesejahteraan seluruh masyarakat bangsa.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan yaitu 1 orang kepala distrik, 1 orang sekretaris distrik, 3 orang kepala seksi, 3 orang subseksi, 2 orang kepala kampung, 1 orang lurah. Teknik Pengumpulan Data yang dipakai yaitu Teknik Wawancara, Teknik Pengamatan/Obsevasi, dan Teknik Dokumentasi. Serta Teknik Analisis yang di pakai yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, serta Penarik Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Wawancara

1. Pengawasan

pengawasan (*supervisory style*), yaitu kepemimpinan yang diladaskan kepada perhatian seorang pemimpin terhadap perilaku kelompok. Dalam hubungan ini gaya pengawasan dapat dibedakan antara :

- a. Pengawasan yang Berorientasi pada pegawai (*employee-oriented*), dimana pemimpin selalu memperhatikan anak buahnya yang bermartabat.
- b. Pengawasan Berorientasi kepada produksi (*production oriented*), dimana pemimpinnya itu selalu memperhatikan proses produksi serta metode-metodenya.
- c. Pengawasan Interen dan Ekstren. Adalah pengawan yang dilakukan oleh

orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit kerja organisasi yang bersangkutan, “pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat., (*builtin control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspetorat jenderal pada setiap kementerian dan inspetorat wilayah kerja setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya dibawa pengawasan kementerian dalam negeri.

- d. Pengawasan Preventif dan reprensif adalah pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilakukan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan keuangan Negara maka yang akan membebankan dan merugikan Negara lebih besar. Disisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagai mana yang dikehedaki. Oleh pengawasan prevektif akan lebih bermanfaat dan bermakana jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeksi lebih awal.

Disisi lain pengawasan reprensif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan itu dilakukan” pengawasan model ini lasimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya itu untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

- e. Pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilakukan ditempat melaksanakan kegiatan yang bersangkutan” hal ini

berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “ penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawab yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran” disisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaannya itu terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut. Diperlukan dan beban biayanya serendah mungkin”.

- f. Melaksanakan Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) dan pemeriksaannya kebenaran materiil mengenai maksud dan tujuan pengeluaran (*dolmatigheid*). Dalam berkaitannya dengan penyelewengan Negara, melaksanakan pengawasan yang ditunjukkan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran Negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri”. Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan kebijakan Negara dapat berjalan sebagai mana direncanakan.

PEMBAHASAN

1. Pengawasan Pembangunan pengawasan (*supervisory style*), yaitu kepemimpinan yang diladaskan kepada perhatian seorang pemimpin terhadap perilaku kelompok. Dalam hubungan ini gaya pengawasan dapat dibedakan antara :
 - g. Pengawasan yang Berorientasi pada pegawai (*employee-oriented*), dimana pemimpin selalu memperhatikan anak buahnya yang bermartabat.
 - h. Pengawasan Berorientasi kepada produksi (*production oriented*), dimana pemimpinnya itu selalu memperhatikan

proses produksi serta metode-metodenya.

- i. Pengawasan Interen dan Ekstren. Adalah pengawan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit kerja organisasi yang bersangkutan, “pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat., (*buitin control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspetorat jenderal pada setiap kementerian dan inspetorat wilayah kerja setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya dibawa pengawasan kementerian dalam negeri.
- j. Pengawasan Preventif dan repressif adalah pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilakukan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan keuangan Negara maka yang akan membebankan dan merugikan Negara lebih besar. Oleh pengawasan prevektif akan lebih bermanfaat dan bermakana jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeksi lebih awal.
- k. Pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilakukan ditempat melaksanakan kegiatan yang bersangkutan” hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “ penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawab yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.”
- l. Melaksanakan Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) dan pemeriksaannya kebenaran materiil mengenai maksud dan tujuan pengeluaran (*dolmatigheid*). Dengan

dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan kebijakan Negara dapat berjalan sebagai mana direncanakan.

Gaya Kepemimpinan Pengawasan

Gaya Kepemimpinan Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung penyampaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut *controlling is the process of measuring performance antaking action to ensur results*. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities*.

Kepemimpinan Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja-kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menentukan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang harus diperlukan untuk menyamin bahwa semua sumber daya pemerintahan. Dengan adanya pengurusan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajer dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan, penyelengan atau penyimpangan atas tujuan akan dicapai.

Sasaran pengawasan adalah temuan-temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah: 1. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan-perbaikan; 2. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan; 3. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran.

2. Perencanaan Pembangunan

Efektivitas perencanaan pembangunan dalam penelitian ini digunakan untuk menduga tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Efektivitas perencanaan pembangunan dimaksudkan disini ialah untuk mengungkapkan apakah perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Distrik bersama-sama dengan aparat yang ada di desa telah dilakukan dengan efektif. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas perencanaan Pembangunan ini antara lain: tingkat kejelasan tujuan atau sasaran dari rencana program yang dibuat/ditetapkan; tingkat kesesuaian atau ketepatan rencana program dengan kebutuhan dan aspirasi/keinginan masyarakat desa, dengan situasi dan kondisi desa, dengan potensi sumber daya alam di Desa dan dengan potensi atau kemampuan masyarakat Desa setempat, tingkat keterpaduan rencana program yang ditetapkan dengan program-program dari pemerintah; dan tingkat kejelasan rencana program yang ditetapkan dilihat dari rincian kegiatan, waktu, dana atau biaya, dan lain-lain. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pada umumnya masyarakat melihat bahwa perencanaan pembangunan di Desa mereka masih belum berlangsung efektif. Hal ini terutama dilihat dari hal-hal seperti kejelasan sasaran program, kesesuaian dengan aspirasi atau kebutuhan masyarakat, kesesuaian dengan potensi sumber-sumber pembangunan di Desa, keterpaduannya dengan program pemerintah, serta kejelasan rencana program dilihat dari rincian kegiatan, waktu, dana dan lainnya.

3. Lingkungan Kerja.

Lingkungan kerja, salah satu penghambat mengenai lingkungan kerja yang dimaksudkan dalam hal ini kurangnya fasilitas-fasilitas kantor yang dapat dorongan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintah Distrik, jadi fasilitas-fasilitas Kantor merupakan unsur dorongan

pegawai yang meningkatkan kinerjanya para aparatur atau pegawai. Pemimpin dalam memberikan motivasi atau dorongan terhadap, pegawai yang dapat ditandai dengan adanya tingkat absensi yang rendah, adanya kerya sama antara pegawai dan adanya disiplin kerja, berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada Kantor Distrik Tiom yakni: a. pegawai belum percurakan sepenuhnya pada pekerjaan, sehingga masih ada pegawai dalam melaksanakan tugas terkesan kurang baik kreatif. b. hubungan kerjanya yang kurang, fasilitas Kantor kurang dan lingkungan kerja. c. Tampak kejadian ada beberapa oknum yang kandang nongrong dipasar, keluar pada waktu jam kerja masuk kantor terlambat, pulangpun cepat waktu, dan berbagai kengiatan lainnya yang tidak berkaitan pada tugas mereka, hal ini menurun asumsi penulis disebabkan motivasi yang redah.

4. Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan

Dalam penelitian ini keberhasilan pelaksanaan Pembangunan didefinisikan sebagai tingkat realisasi dari pelaksanaan program-program atau proyek-proyek Pembangunan yang telah ditetapkan atau yang telah dibuat perencanaannya. Indikator utama pengukurannya dilihat pada tingkat dukungan partisipasi masyarakat, dan tingkat pencapaian sasaran atau target dari pada program yang ditetapkan baik dilihat dari segi keberhasilan fisik maupun segi kemanfaatannya bagi masyarakat desa setempat. Berdasarkan data tersebut dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan pembangunan didesa tidak semuanya selalu berhasil, atau dengan kata lain ada juga yang pelaksanaannya kurang berhasil. hubungan antara efektivitas perencanaan dan keberhasilan pelaksanaan Pembangunan. Dapat dilihat bahwa Pembangunan yang perencanaannya dinilai efektif cenderung berhasil dalam pelaksanaannya; demikian sebaliknya, Pembangunan yang perencanaannya tidak efektif cenderung tidak atau jarang sekali berhasil dalam

pelaksanaannya. Berdasarkan pada yang telah disajikan diatas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan program Pembangunan yang ada di Distrik Tiom belum efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam bab sebelumnya, memberikan suatu kesimpulan yang dapat digeneralisasi untuk mengungkapkan fenomena permasalahan pembangunan di Daerah pedesaan umumnya. Kesimpulan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa masyarakat yang ada di Distrik Tiom Keadaan masih sangat minimnya pelaksanaan pembangunan.
2. Baik perencanaan maupun pengawasan pembangunan yang berlangsung didesa selama ini pada umumnya belum efektif.
3. Kurang atau tidak berhasilnya pelaksanaan Pembangunan pada tingkat dominan disebabkan oleh belum efektifnya perencanaan dan pengawasan Pembangunan itu.

Saran

1. Perlunya ditingkatkan perhatian pemerintah terhadap wilayah pedalaman, karena mengingat masih banyaknya daerah tertinggal, dengan taraf kehidupan yang masih pra sejahtera.
2. Perlunya Pelaksanaan Pembangunan yang ada Distrik belum efektif kurangnya pengawasan oleh karena itu, kepala Distrik mampu melakukan koordinasi dengan pemerintah desa agar kelembagaan yang terdapat di Distrik dapat saling bekerja sama dan bergotong-royong dalam meningkatkan kinerja..
3. Meningkatkan efektifitas kerja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.
4. Meningkatkan fungsi pengawasan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan secara efektif dan kemampuan pribadi

yang di miliki agar lingkungan kerja lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, B. Firman & Sirait Martin S. 1982. Perencanaan dan Evaluasi Suatu Sistem Untuk Proyek Pembangunan, Jakarta: Bina Aksara.
- Bryant Louise dan Coralie White, 1985. *Manajemen Pembanguna Untuk Negara-Negara Berkembang* (terjemahan), Jakarta: LP3ES.
- Moleong, L, J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi Hadari, 1999. *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta : Erlangga.ks
- Ndraha Taliziduhu, 1987. *Pembangunan masyarakat*, Jakarta : Bina Aksara
- Siagian Sondang, 1981. *Bunga Rampai Manajemen Modern*, PT. Gunung Agung Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1983. *Teori sosiologi tentang perubahan sosial*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Terry, George R, 1986. *Asas-asas manajemen*, Alumni 1986 : Bandung.
- Tjokroamidjojo Bintoro, 1984. *Pengantar Administrasi pembangunan*, LP3ES, Jakarta.